

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal S & Masykur, M. 2012. Kebijakan Publik. Salemba Humanika. Jakarta.
- Agustino.L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Ali, M. 2011. Memahami Riset Perilaku dan Sosial. Pustaka Cendikia Utama. Bandung.
- Alim S, Ynasaf U, Winaryanto S. 2008. Implikasi Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Kegiatan Penyuluhan Peternakan di Kabupaten Sumedang (Kasus di Cabang Dinas Pertanian Tanjungsari Sumedang). Jurnal Ilmu Ternak Vol.8, No 1, 72-76.
- Alisjahbana. S.A. 2013. Ketahanan Pangan Dalam Program Pembangunan Nasional. Tempo Edisi 4235/28 Oktober-3November 2013 Halaman 127.
- Anderson, James E.2000. *Public Policy Making*. Boston. Houghton Mifflin.
- Anonim. 2014. Road Map Pengembangan Industri Sapi Potong Di Indonesia. Disampaikan Pada FGD Road Map Pengembangan Industri Sapi Potong di IndonesiaKerjasama Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada dan APFINDO (Seminar Road Map Indusrti Sapi). Jogjakarta.
- Arifin Bustanul. 2005. Pembangunan Pertanian (Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi). Jakarta: PT Grasindo.
- Arikunto,S. 2010. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Sensus Pertanian 2013 Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- Badan Pusat Statistik. 2012. Indonesia Dalam Angka “Konsumsi Kapita Daging Sapi Penduduk Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2012. Indonesia Dalam Angka “Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2012. Sumbar Dalam Angka 2012. Padang.
- Ban .D.V dan Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Kanisius, Yogyakarta.
- Brigman.P & Glyn Davis.2004. *The Australian Policy Handbook. Crows Nest: Allen and Unwin.*

- Dabukke, B.M.F & Iqbal, M. 2014. Kebijakan Pembangunan Pertanian Thailand, India dan Jepang Serta Implikasinya Bagi Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 12 No.2, Desember 2014: 87-101.
- Danim, S. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Akasara. Jakarta.
- Daryanto.A. 2009. *Dinamika Daya Saing Industri Peternakan*. IPB Press. Bogor.
- Dayat. 2011. *Fungsi-Fungsi Dalam Sistem Penyuluhan Pertanian Di Era Otonomi Daerah Kasus Di Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat*.
- Detikfinance. 23 Juli 2013. Konsumsi daging Sapi Indonesia Setiap Tahun Capai 4 Juta Ekor Sapi. <http://finance.detik.com> Diunduh tanggal 7 Oktober 2014.
- Detilfinance. 13 Agustus 2013. Stok Sapi dan Kebutuhan Daging Sapi Nasional Tahun 2013. <http://finance.detik.com> Diunduh 8 Oktober 2014.
- Dinas Peternakan Sumatera Barat. 2011. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Sumbar*. Padang.
- Direktorat Budidaya Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia. 2015. *Daftar Regulasi Pembangunan Peternakan Indonsia*. Diunduh pada <http://budidaya.ditjennak.deptan.go.id>, tanggal 1 Maret 2015.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2013. *Rencana Kerja Tahunan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2013*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2010. *Blue Print Program Swasembada Daging Sapi 2014*. Direktorat Jenderal Peternakan. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2012. *Kuota Impor Daging Sapi Tahun 2012*. Diunduh pada <http://ditjennak.pertanian.go.id> tanggal 8 Agustus 2016.
- Dunn.N, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Edisi Ketiga, Revisi 2011. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dye, Thomas R, 1995. *Understading Public Policy*. New Jersey. Prentice Hall.
- Emilia.E, 2009. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung.

- Ellis, F. 1992. *Agricultural Policies in Developing Countries*. Cambridge University Press. Melbourne.
- Ervin. A.M. 2000. *Applied Anthropology: Tools and Perspectives for Contemporary Practice*. Boston. Allyn and Bacon.
- Fauziyah, D., Nurmalina, R., Burhanuddin. Pengaruh Karakteristik Peternak Melalui Kompetensi Peternak Terhadap Kinerja Usaha Ternak Sapi Potong di Kabupaten Bandung. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol 3 No 2, halaman 83-96.
- Hermanto. 2009. Reorientasi Kebijakan Pertanian Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Volume 7 Nomor 4: 360-383.
- Hogwood dan Gunn. 1990. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press Dubois. Boston.
- <http://www.datastatistik-indonesia.com>. Jumlah Kelahiran Bayi Di Indonesia. Diunduh tanggal 7 Oktober 2014.
- Husodo S, Arifin M. 2009. Kebijakan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Di Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Sleman Propinsi D.I. Yogyakarta. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Volume 5, Nomor 2 : 61-78.
- Ibrahim, Jabal Tarik. Arman Sudiyono. dan Harpowo. 2003. *Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian*. Banyumedia Publishing, UMM Press, Malang.
- Iqbal, M. Dan T. Sudaryanto. 2008. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Prespektif Kebijakan Pembangunan Pertanian. *Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 6 No. 2, Juni 2008: 155- 173.
- Kartasmita, G. 1997. Pemberdayaan masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat. Disampaikan pada Serasehan DPD Golkar Tingkat I Jawa Timur, Surabaya, 14 Maret 1997. <http://www.ginandjar.com>. [27 September 2008].
- Leeuwis.C. 2009. *Komunikasi Untuk Inovasi Pedesaan*. “Berfikir Kembali Tentang Penyuluhan Pertanian”. Kanisius. Yogyakarta.
- Lionberger, H.F. and P.H. Gwin, 1982. *Communication Strategies: A Guide for Agricultural Change Agents*. The Interstate Printers & Publisher, Inc. Denville, Illinois.

- Ma'sum, M. 2011. Implikasi Kebijakan Perbibitan Sapi Terhadap Adopsi Inovasi Inseminasi Buatan Pada Peternak Sapi Potong [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mardikanto, T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. UNS-Press. Surakarta.
- _____. 1998. Bunga Rampai Penyuluhan Pertanian. Bali Pustaka. Jakarta.
- _____. 2002. Redevenisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. PUSPA. Sukoharjo.
- _____. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Kerjasama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press). Surakarta.
- Mariana, D. 2010. Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. Jurnal Governace, Vol 1, Nomor 1, November 2010.
- Marzali, A. 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Kencana Prenanda Media Group. Jakarta.
- Mellor, W.J. 1966. The Economic of Agricultural Development. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Meier, G.M. 1995. *Leading Issues in Economic Development*. Oxford University Press. New York.
- Moore, M. 1995. *Creating public value*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Mosher, A.T. 1981. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Yasaguna Jakarta Christma, Jakarta.
- Mosher, A.T. 1996. *Getting Agriculture Moving*. New York : A Praeger, Inc. Publisher.
- Mufti, M dan Naafisah, D.D. 2013. Teori-Teori Demokrasi. Pustaka Setia. Bandung.
- Murwanto, G.A. 2008. Karakteristik Peternak dan Tingkat Masukan Teknologi Peternakan Sapi Potong di Lembah Prafi Kabupaten Manokwari. Jurnal Ilmu Peternakan, Vol. 03 No. 1, halaman 8-15.
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nugroho, R. 2009. *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Putra, N & Hendarman. 2012. Metode Penelitian Kebijakan. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Provinsi Sumatera Barat. 2011. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Padang.

_____. 2011. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Padang.

_____. 2011. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat. Padang.

_____. 2007. Intruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor: 520 - 419 – 2007 Tentang Pengawasan Lalulintas Hewan Dan Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban Gubernur Sumatera Barat. Padang.

_____. 2007. Intruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 03 /Inst / Gsb / 2007 Tentang Keharusan Menggunakan Stempel Daging Yang Berasal Dari Rumah Pemotongan Hewan Dan Tempat Pemotongan Hewan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Gubernur Sumatera Barat. Padang.

Rahadian. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian Dalam Mewujudkan Kemandirian Kelompok-Tani Studi Kasus Di Kabupaten Subang-Profinsi Jawa Barat. Jurnal Ekonomi, Volume XXVI, Edisi Februari 2008:119.

[RI] Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125. Skretariat Negara. Jakarta.

_____. 2006. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92. Skretariat Negara. Jakarta.

_____. 2009. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 149. Skretariat Negara. Jakarta.

_____. 2009. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 84. Skretariat Negara. Jakarta.

_____. 2012. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227. Skretariat Negara. Jakarta.

- _____. 2014. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 338. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 1977. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha Peternakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Tetang Pembagian Urusan Pemerintah Provinisi dan Kabupaten/Kota. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan, .an Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2005. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Orgaisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2014. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- _____. 2009. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian Tahun 2010. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- _____. 2010. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014. Kementerian Pertanian. Jakarta.

- Ripley, Ronald B and Grace Franklin. 1986. *Policy Implementation Beraucracy*. Chicago : Dorsey Press.
- Romahurmuziy. 2013. Politik Dan Regenerasi Penyuluhan: Pandangan Terhadap Kebijakan Penyuluhan Dan Implikasi Politik Ekonomi. Dipresentasikan Pada Seminar Nasional Penyuluhan Pertanian. IPB. Bogor.
- Rustamaji G. 2002. Kajian Proses Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Otonomi Daerah Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur [Tesis]. Program Pascasarjana IPB.
- Setiana, L. 2005. Teknik Penyuluhan & Pemberdayaan Masyarakat. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sholahuddin,S. 2009. Pertanian : Harapan Masa Depan Bangsa. IPB Press. Kampus IPB Taman Kencana Bogor.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.
- Sidney. 2007. *Perumusan Kebijakan Publik*. Amidjaya. Jakarta : BNSP.
- Simatupang, P. 2003. Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. *Jurnal analisis kebijakan pertanian* Volume 1 Nomor 1.
- Slamet, Margono 2001. Menata Sistem Penyuluhan Pertanian Di Era Otonomi Daerah. *Ekstensia* Vol 3. Bogor.
- _____. 2000. Menetapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan Dalam Pembangunan. Disampaikan Dalam Seminar Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani di Bogor, 25-26 September 2000.
- Soewardi, H. 1987. Perkembangan Penyuluhan Pertanian di Indonesia Makalah disajikan dalam Kongres PERHIPTANI Ke I di Subang, tanggal 4-6 Juli.
- Subejo 2006. Penyuluhan Pertanian Indonesai Di Tengah Isu Desentralisasi, Privatisasi Dan Demokrasi. *Jurnal Penyuluhan*. Vol.2 No.2 : 69-76. Bogor.
- Subejo. 2007. Memahami dan Mengkritisi Kebijakan Pembangunan Pertanian Di Indonesia. makalah ilmiah pada Temu Nasional Mahasiswa Pertanian Indonesia/Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa (LKMM), Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta 15 Februari 2007.
- Sudaryanto T, Rusastra WI. 2006. Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Litbang Pertanian* Vol 25 (4) : 115-122. Bogor.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Alfabeta. Bandung.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.
- Suharto.E, 2010. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung.
- Supiyani. 2009. *Persoalan Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah*. Diunduh pada tanggal 20 Juni 2016 pada: <http://supiyani16.blogspot.co.id>.
- Swanson, Barton E. 1997. *Report of the Global Consultation on Agriculture Extension*. FAO-UN Rome.
- Tambuban, T. 2010. *Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Thody,A. 2006. *Writing and Presenting Research*. London:sage Publications.
- Timmer, W.J. 1983. *The Human Side of Agriculture*. New York: Vantage press.
- Todaro, M. P. 1998. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi kelima. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Van Den Ban. A.W. dan H.S Hawkins., 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.
- Wahab, A, S. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UMM Press. Malang.
- Widjaja.H, 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Edisi dan Terbaru*. Media Presindo. Yogyakarta.
- Word Bank.2002. *Intergrating Gender Into the World Bank's Work : A Strategy for Action*, www.worldbank.org.id. Diunduh 8 Oktober 2014.
- www.investor.co.id. *Kebutuhan Daging Sapi Indonesia Tahun 2013*. Diunduh 8 Oktober 2014.
- Young dan Quinn.2002. *Writing Effective Public Policy Paper: A Guide of Edvisers in Central and Eastern Europe*. Budapest.
- Yuwono, Triwibowo (Ed.). 2011. *Pembangunan Pertanian : Membangun Kedaulatan Pangan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.